



## **KEBIJAKAN**

# **Damkarmat Seleksi Laporan Masyarakat**

## **Imbas Harga BBM Non-Subsidi Naik Tajam**

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamina dan Pertamina Dex mulai memukul pos anggaran operasional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Salah satu yang terdampak paling signifikan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta.

Akibat melambungnya harga energi tersebut, alokasi anggaran murni untuk operasional armada pemadam diprediksi hanya akan bertahan maksimal hingga September 2026 mendatang.

Merespons kondisi tersebut, jajaran Damkarmat terpaksa mengambil langkah taktis dengan memperketat filter terhadap setiap laporan atau aduan yang masuk dari masyarakat. Petugas di lapangan kini dituntut lebih selektif, khususnya dalam merespons permintaan evakuasi atau penanganan non-kebakaran.

Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Taokhid mengungkapkan bahwa secara nominal pagu anggaran instansinya sebenarnya tidak mengalami pemotongan atau penurunan. Kendati demikian, meroketnya harga BBM di pasaran secara otomatis menggerus daya beli dan volume bahan bakar yang bisa diakses untuk armada operasional, terutama truk pemadam yang mengonsumsi Pertamina Dex.

■ **Baca DAMKARMAT... Hal II**

# Damkarmat Seleksi Laporan Masyarakat

sambungan dari hal Joglo Jogja

"Kalkulasi yang kami lakukan dari anggaran murni kemarin itu hanya cukup sampai dengan bulan September, itu maksimal. Karena kenaikan harga, otomatis volume (BBM) yang bisa kita beli berkurang. Benefit-nya yang berkurang," ujar Taohid saat dikonfirmasi, belum lama ini.

Guna menyalasi anggaran yang kian terbatas, Taohid menegaskan skala prioritas pelayanan kini mutlak disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) utama instansi, yakni penanganan kondisi keselamatan nyawa manusia.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk memahami batasan kewenangan itu. Warga diharapkan mulai melakukan penanganan secara mandiri untuk urusan-urusan kecil yang tidak bersifat membahayakan atau darurat.

"Cukup banyak penanganan evakuasi non-kebakaran yang sebenarnya tidak membahayakan atau bisa dilakukan secara mandiri

oleh masyarakat, tapi dimintakan ke Damkar. Itu yang kita filter sekarang, karena operasionalnya butuh BBM," terangnya.

Ia mencontohkan, salah satu permintaan warga yang kerap masuk namun berada di luar tugas utama Damkarmat adalah permohonan penyiraman fasilitas umum. Seperti pembersihan lokasi penyembelihan hewan kurban saat Iduladha lalu, atau penyiraman area sebelum dan sesudah event kemasyarakatan. Namun, untuk kasus

ke darurat non-kebakaran yang dinilai membahayakan dan butuh penanganan khusus, seperti evakuasi binatang berbisa hingga penanganan warga yang tangannya terjepit, Damkarmat dipastikan tetap akan turun tangan.

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menegaskan bahwa Pemkot Yogyakarta tidak akan tinggal diam. Ia menjamin urusan pelayanan publik yang menyangkut keselamatan nyawa manusia tidak boleh

dikorbakan atau dikurangi volumenya. Dua skema taktis pun disiapkan untuk menambal defisit anggaran tersebut.

Skema pertama adalah mengandalkan pos dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Hasto membeberkan, plafon anggaran BTT Kota Yogyakarta tahun ini masih sangat longgar, yakni mencapai Rp35 miliar karena minimnya penyerapan. Dana cadangan itu siap dicairkan sewaktu-waktu melalui mekanisme ke daruratan yang cepat dan berkepastian hukum.

"Kalau ada kebutuhan mendadak, entah itu di Damkar atau yang lain, kita cairkan dari itu (BTT). Selain itu, sebelum September kan anggaran perubahan (APBD Perubahan 2026) sudah bisa diproses. Jadi tidak akan kita biarkan," tegas Wali Kota.

Hasto tak menampik, penyesuaian harga energi ini ikut mengerek ongkos logistik sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lain yang bertumpu pada moda transportasi berat. Salah satu yang ikut

terdampak nyata adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta yang setiap harinya harus memobilisasi puluhan truk armada pengangkut sampah.

"Kemarin saya sudah ngomong bahwa belanja yang terkait dengan transportasi pasti meningkat karena dampak kenaikan bahan bakar. Sehingga DLH yang paling banyak punya truk untuk mengangkut sampah, ya akhirnya anggarannya juga harus dinaikkan (di APBD Perubahan)," pungkasnya. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005